RENSTRA STRATEGIS
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
2025 – 2029



BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025

RENCANA STRATEGIS
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
2025 – 2029

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR ii
KATA PENGANTAR iii
I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Kondisi Umum 2
1.2.1 Struktur Organisasi 2
1.2.2 Sumberdaya Manusia 3
1.2.3 Potensi dan Permasalahan/Tantangan 4
II. VISI, MISI DAN TUJUAN 8
2.1 Visi 8
2.2 Misi 8
2.3 Tujuan 9
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 10
3.1 Arah Kebijakan 11
3.2 Strategi 12
IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 13
4.1 Target Kinerja 13
4.2 Kerangka Pendanaan 14
V. PENUTUP 16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan per Desember 2025 4
Tabel 2. Target Kinerja 2025-2029 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 3
Gambar 2. Grafik Sumberdaya Manusia BRMP Jakarta.....4
Gambar 3. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 11

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2025-2029 merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Renstra Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2025-2029 disusun dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis dan dinamis terhadap isu-isu aktual terkait dengan penerapan standar instrumen pertanian dalam pembangunan pertanian di DK Jakarta.

Renstra Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2025-2029 mengacu pada Renstra Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Jakarta dan Renstra Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang dilaksanakan secara berjenjang dengan mempertimbangkan peluang, tantangan, keunggulan dan kendala spesifik lokasi DK Jakarta.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2025-2029. Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam penerapan modernisasi pertanian baik oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta maupun mitra stakeholder terkait lainnya dalam penerapan modernisasi pertanian di wilayah DK Jakarta.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

Dr. Sri Sasmita Dahlan SP, M.Si

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN) Jakarta adalah salah satu unit kerja eselon 3 Kementerian Pertanian Republik Indonesia di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian serta Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2025. Tugas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian ialah melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, yang terjabarkan ke dalam fungsi (1) pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; (2) pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; (3) pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian; (4) pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian; (5) pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; (6) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; (7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian dan (8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sebagai hasil transformasi dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta yang sebelumnya juga bertransformasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta, memiliki peran penting dalam reformasi sektor pertanian Indonesia khususnya di Jakarta. Sektor pertanian Indonesia yang tengah menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan teknologi tepat guna, efisiensi produksi, hingga daya saing produk di pasar global. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta hadir sebagai motor penggerak untuk mengatasi hambatan tersebut melalui, penerapan dan diseminasi teknologi modern menuju sistem pertanian yang lebih efisien, berdaya saing, adaptif, dan berkelanjutan spesifik Jakarta. Keberadaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menjadi bagian dari proses pembelajaran kelembagaan (learning process) yang dinamis, menuju posisi sebagai lembaga terdepan dan pusat rujukan dalam pengembangan serta pemanfaatan penerapan modernisasi pertanian dan teknologi spesifik lokasi. Kiprah Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dibangun di atas fondasi pengalaman panjang dari lembaga-lembaga pendahulunya, yang telah meletakkan dasar kuat dalam perekayasaan pertanian.

Guna mengimplementasikan Tugas dan Fungsi (TUSI) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Renstra unit di atasnya. Pada hakekatnya penyusunan Renstra Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara umum, Renstra Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta berisikan uraian tentang kondisi umum; potensi, permasalahan dan tantangan; sasaran umum kebijakan, strategi utama, tujuan, sasaran strategis; arah kebijakan, strategi, program; kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta periode 2025- 2029. Renstra ini juga merupakan acuan dalam melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran 2025-2029 yang menuntut Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja (*performance-based budgeting*) sehingga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi secara berkala.

1.2 Kondisi Umum

1.2.1 Struktur Organisasi

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha, Tim Kerja Program Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi Pertanian, Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Mengacu pada Permenpan RB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/ Kpts./ OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Petanian, struktur organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

1.2.2 Sumberdaya Manusia

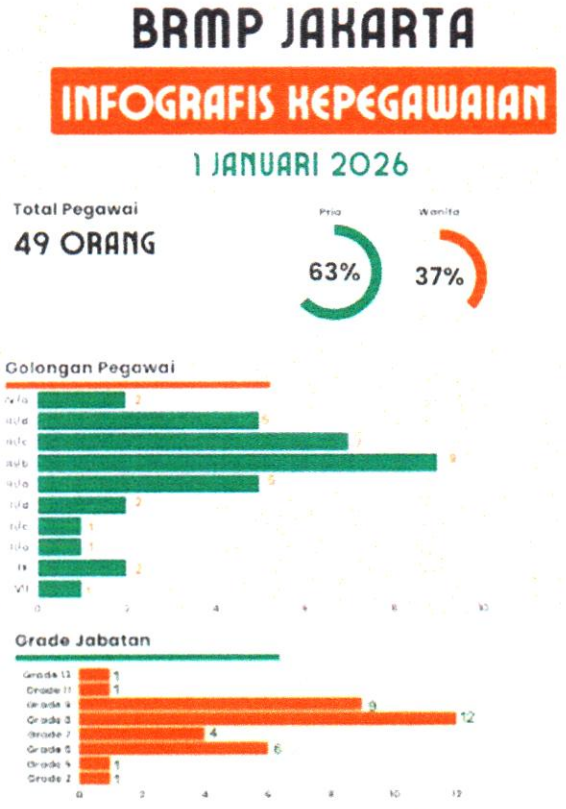
Keberhasilan kegiatan penerapan modernisasi pertanian di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tidak terlepas dari dukungan dan optimalisasi manajemen sumber daya yang tersedia. Jumlah pegawai per awal Januari 2026 sebanyak 49 orang terdiri dari golongan II sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 26 orang, golongan IV sebanyak 2 orang dan untuk PPPK golongan IX sebanyak 2 orang dan golongan VII sebanyak 1 orang. Jenjang pendidikan terdiri dari: SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 7 orang, Sarjana Muda D1/D2/D3 sebanyak 3 orang, S1/D4 sebanyak 9 orang, S2 sebanyak 13 orang dan S3 sebanyak 2 orang (Tabel 1). Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Juga memiliki 11 orang pegawai PPPK Paruh Waktu dan 3 orang PPNPN.

Komposisi SDM menurut jabatan per Desember 2025, terdiri dari: jabatan struktural sebanyak 2 orang. Yaitu Kepala Balai dan Kasubag Tata Usaha. Selanjutnya komposisi jabatan fungsional meliputi: Analis Standardisasi Muda 6 orang, Analis Standardisasi Pertama 7, Penyuluh Pertanian Madya 2 orang, penyuluh pertanian Muda 1 orang, Penyuluh Pertanian Pertama 2 orang, pengawas benih tanaman ahli pertama 2 orang, pranata komputer ahli pertama 1 orang, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 2 orang, Pustakawan Pertama 1 orang , Fungsional Umum 9 orang (Tabel 1). Grafik sumberdaya manusia BRMP Jakarta dijelaskan pada Gambar 2.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan per Desember 2025

No.	Pendidikan Pegawai	Jumlah Pegawai (orang)	Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai (orang)	Jabatan Pegawai	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Doktor (S3)	2	Golongan IV	2	Pejabat Struktural	2
2.	Magister (S2)	13	Golongan III	26	Analis Standardisasi Muda	6
3.	Sarjana (D4/ S1)	9	Golongan II	4	Analis Standardisasi Pertama	7
4.	Sarjana Muda (D1/D2/D3)	3	Golongan I	0	Penyuluh Pertanian Madya	2
5.	SLTA	7	Golongan IX *)	2	Penyuluh Pertanian Pertama	3
6.	SLTP	1	Golongan VII	1	Pengawas benih tanaman ahli pertama	2
					Pranata Komputer ahli pertama	1
					Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	2
					Pustakawan Pertama	1
					Fungsional Umumi	9
	JUMLAH	**35**		**35**		**35**

Keterangan : *) Golongan IX pada staf PPPK setara dengan Golongan III a pada PNS



Gambar 2. Grafik Sumberdaya Manusia BRMP Jakarta

1.2.3 Potensi dan Permasalahan/Tantangan

Pemerintah Provinsi DK Jakarta mengembangkan pertanian perkotaan (*urban farming*) yang meliputi tiga sub-sektor, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Desain besar

pertanian perkotaan DKI Jakarta Tahun 2018 – 2030 memiliki tiga target utama, yaitu 30% ruang terbuka hijau produktif, 30% peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan (termasuk produk olahan), dan 1000 sertifikasi produk olahan pertanian, peternakan, dan perikanan (Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2017). Sejalan dengan target tersebut, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta mendukung upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya pertanian dan peternakan di Provinsi DK Jakarta melalui penerapan paket teknologi spesifik lokasi modernisasi pertanian dibidang budidaya/ pengolahan/ pemasaraan, sehingga tercipta produktivitas sumber daya pertanian perkotaan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan perkembangan teknologi serta meningkatkan daya saing produk hasil pertanian/produk hewan.

Hasil sensus pertanian 2023 oleh BPS (2023) menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan proporsi Usaha Pertanian Perorangan (UTP) *urban farming* terbesar di Indonesia (1,48% dari total UTP di DKI Jakarta). Potensi *urban farming* DK Jakarta cukup besar untuk dikembangkan. Penerapan modernisasi pertanian dapat menjadi mendorong perkembangan *urban farming* di wilayah ini.

Peluang pengembangan penerapan modernisasi pertanian di DK Jakarta terbuka lebar. Adanya diversifikasi produk pertanian yang *ready to cook* dan *ready to eat* sehingga mempermudah konsumen, lokasi usaha/produksi yang dekat dengan target pasar, ketersediaan infrastruktur yang memadai, serta keberadaan kanal pemasaran digital membantu perluasan jangkauan pemasaran dengan biaya yang efektif, merupakan faktor pendukung berkembangnya penerapan modernisasi pertanian. Penerapan modernisasi pertanian menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Produk pertanian modern memiliki akses lebih baik dan mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dukungan pemerintah daerah bagi pelaku pertanian perkotaan, potensial dalam mendorong penerapan modernisasi pertanian di DK Jakarta, diantaranya melalui: Program pembinaan kewirausahaan terpadu (jakpreneur); Kebijakan Sistem e-Order pada penyediaan makan minum sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Transaksi Pengadaan Langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil; Pelayanan pengujian lab secara gratis bagi UMKM; Tersedia petugas pendamping di setiap kecamatan, fasilitasi kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak oleh biro kerjasama daerah; Fasilitasi pelatihan peningkatan kompetensi oleh Dinas KPKP Prov. DKI Jakarta; serta dibangunnya Dapur Produksi Jakpreneur di *Small Processing Unit* (SPU) *Training Center* (TC) Pertanian Klender untuk menjawab permasalahan yang kerap dialami Jakpreneur binaan Dinas KPKP dalam hal keterbatasan dan kelaikan dapur produksi. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta hadir untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan para stakeholder mendorong

penerapan modernisasi pertanian perkotaan di DK Jakarta. Penerapan modernisasi pertanian oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sejalan dengan program peningkatan produktivitas dan kualitas produk pangan yang dikembangkan Pemerintah Provinsi DK Jakarta.

Keberadaan petani milenial dapat berkontribusi sebagai motor penggerak penerapan pertanian modern di DK Jakarta. Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 (BPS, 2023) tercatat terdapat 8.347 orang petani milenial. Jika dilihat karakteristiknya, petani milenial tersebut berusia 19–39 tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Teknologi digital mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, penggunaan internet/telepon pintar/teknologi informasi, penggunaan drone, dan/atau penggunaan kecerdasan buatan. Dengan karakteristik tersebut petani milenial berpotensi sebagai pegiat modernisasi pertanian, dengan mengadopsi dan mendiseminasikan modernisasi pertanian.

Pesatnya laju konversi dan alih fungsi lahan budidaya di wilayah ini menjadi ancaman terhadap keberadaan lahan budidaya (pertanian, peternakan dan perikanan). Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut pelaksanaan budidaya difokuskan pada pelaksanaan budidaya berbasis ruang. Konsep ini menitikberatkan pada upaya pemanfaatan ruang-ruang kota seperti kolong tol, ruang terbuka publik , lahan tidur untuk pelaksanaan budidaya melalui dukungan teknologi budidaya pertanian modern guna menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian yang dihasilkan.

Jakarta perlu dipersiapkan sebagai kota global setelah tidak menyandang status ibu kota negara (IKN), antara lain melalui pembinaan, pengembangan dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan UMKM dapat mendukung diversifikasi ekonomi di berbagai sektor, mendukung penciptaan lapangan pekerjaan sehingga berkontribusi dalam pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup masyarakat meningkat. Melalui pendampingan penerapan modernisasi pertanian dan teknologi spesifik lokasi, diharapkan petani dan UMKM bidang pertanian dapat mengoptimalkan kualitas dan hasil produksi yang diperlukan untuk dapat bersaing dalam skala global.

Kendala penerapan modernisasi pertanian di wilayah Jakarta diantaranya: (a) sarana dan prasarana pendukung penerapan modernisasi pertanian, (b) sumberdaya penerap modernisasi pertanian dan (c) skala usaha. Penerapan modernisasi pertanian oleh petani dan UMKM perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang mumpuni, sebagian besar petani UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai, sarana produksi yang digunakan masih manual biasanya dalam bentuk handmade sehingga standar kualitasnya beragam dan hasil produksinya kurang optimal. Petani dan Pelaku UMKM bidang pertanian di wilayah Jakarta mayoritas tidak memiliki fasilitas gudang/ruang penyimpanan, hal ini akan

mempengaruhi kualitas bahan baku yang belum digunakan maupun produk yang belum terjual. Dapur produksi menyatu dengan dapur rumah, sehingga tidak memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) untuk menghasilkan pangan aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

Pelaku pertanian perkotaan DK Jakarta terkendala status kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan yang bukan milik sendiri mengakibatkan penerapan modernisasi pertanian terkendala dengan keberlangsungan usaha. Berdasarkan hasil ST 2023, bahwa usaha pertanian perorangan (UTP) pengguna lahan pertanian dan usaha pertanian (UTP) (BPS, 2023), terdapat 6.257 petani pengguna lahan di Jakarta, jika dilihat persentase UTP gurem terhadap UTP pengguna lahan, 93.70 persen petani pengguna lahan di DKI Jakarta merupakan petani gurem. Petani gurem memiliki banyak keterbatasan selain pada sumber daya manusianya, juga keterbatasan pada modal usaha, keterbatasan pada akses informasi dan juga keterbatasan akan kepercayaan terutama pada lembaga pemberi kredit usaha. Kondisi keterbatasan ini menjadi faktor penghambat dalam penerapan modernisasi pertanian.

Kendala sumberdaya manusia dalam penerapan modernisasi pertanian diantaranya petani dan pelaku UMKM bidang pertanan di DK Jakarta banyak yang belum paham teknologi pertanian modern, standar bidang pertanian, Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM). Resistensi petani dan pelaku usaha dalam menerapkan teknik budidaya sesuai kebutuhan *off taker* karena dinilai sulit untuk diterapkan. Tenaga pengelola dan produksi kurang terampil. Seringkali bisnis UMKM dan usaha pertanian dikelola oleh keluarga dan biasanya *one man show*, artinya sangat tergantung kepada orang tertentu, sehingga keberlanjutan usahatani/ perusahaan tergantung pada figur bukan sistem. Kendala lainnya kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan *quality control* terhadap produk. Belum tertib administrasi dan lemahnya pendokumentasian juga menjadi penghambat penerapan teknologi spesifik lokasi dan modernisasi pertanian.

Faktor produk dan kapasitas produksi menjadi kendala dalam penerapan modernisasi pertanian di wilayah ini. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna, karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya. Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali petani/ UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah. Bahan baku kurang terstandar, karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Biaya pengujian dan pengurusan sertifikasi serta penerapan modernisasi pertain cukup mahal menjadi kendala bagi pelaku UKM untuk memenuhi kewajiban standar produk yang berkualitas.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi dan Misi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tahun 2025-2029 mengacu pada Visi dan Misi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025 - 2029, yang menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja lingkup BRMP.

2.1 Visi

Mewujudkan lembaga unggul dan berdaya saing global dalam perekayasaan dan modernisasi teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mendukung pertanian Indonesia maju.

2.2 Misi

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional. Proses merancang, menyusun, dan menguji berbagai teknologi yang digunakan dalam sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan.
2. Mengembangkan dan memproduksi prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan modern yang efisien, bernilai tambah tinggi, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Menghasilkan produk teknologi pertanian modern yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan untuk mewujudkan pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan teknologi pertanian terapan perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Dari sisi SDM, kompetensi teknis dan manajerial ditingkatkan melalui pelatihan, sertifikasi, dan kemitraan dengan lembaga riset, perguruan tinggi atau industri. Di sisi kelembagaan, revitalisasi sarana, digitalisasi manajemen, dan penguatan tata kelola menjadi langkah penting, disertai pengembangan jejaring dengan berbagai mitra. Selain itu, dukungan pendanaan berkelanjutan serta sistem diseminasi yang efektif melalui penyuluhan, media digital, dan demonstrasi lapangan sangat dibutuhkan. Seluruh upaya ini perlu didukung dengan evaluasi berbasis kinerja dan dampak nyata bagi sektor pertanian.
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian.Diseminasi hasil

perekayasaan dan perakitan teknologi modern merupakan tahap akhir yang dipengaruhi oleh persepsi pengguna. Persepsi ini ditentukan oleh kesiapan teknologi dan tingkat literasi pengguna. Adopsi terhadap teknologi yang dihasilkan idealnya teknologi tersebut telah mencapai TKT level 8 atau 9. Diseminasi bertujuan mendorong adopsi teknologi melalui kesadaran dan pemahaman yang dilakukan melalui komuni kasi efektif dan promosi melalui berbagai media, serta pendampingan langsung seperti demonstrasi lapangan. Diseminasi yang tepat dapat mempercepat penerapan teknologi dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian

5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri. Perekayasaan dan perakitan diarahkan untuk mengembangkan kerjasama dan sinergi BRMP dengan mitra yang bersifat quarto helix (Academia, Bussines Government, Community). Pola kerja sama internal BRMP dibangun dengan kolaborasi dan sinergi antara UK/UPT lingkup BRMP maupun Eselon 1 lainnya di lingkup Kementerian Pertanian. Pola eksternal dibangun melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, Kementerian/Lembaga lain, para pelaku usaha, maupun masyarakat yang dikerjakan secara simultan dan berkelanjutan.

2.3 Tujuan

a. Mewujudkan jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pertanian nasional melalui penguatan penerapan standar teknis dan penilaian kesesuaian guna memperkuat posisi pelaku usaha tani di pasar domestik maupun internasional.
b. Mewujudkan Modernisasi Pertanian melalui Inovasi Teknologi Digital dan Percepatan Hilirisasi Mengakselerasi produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui pengembangan teknologi *smart farming* dan sistem pertanian modern, serta memastikan pemanfaatan hasil perekayasaan secara luas melalui diseminasi dan kemitraan strategis guna mendukung swasembada pangan.

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Isu pangan dan pertanian menempati posisi sentral di 7 Prioritas Nasional (PN) periode 2025–2029. Fokus pembangunan pertanian terletak pada PN 2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamananan negara dan mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru, yang merupakan pilar sistem pertahanan keamanan negara serta akselerasi kemandirian bangsa melalui swasembada. Dalam konteks ini, ketahanan pangan diposisikan sebagai elemen kunci kedaulatan negara yang sejajar dengan ketahanan energi dan air. Namun, kemandirian tersebut tidak lagi dicapai melalui metode konvensional, melainkan melalui strategi Modernisasi Pertanian yang menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Modernisasi pertanian menjadi mesin penggerak utama PN 2 untuk memastikan swasembada pangan tercapai secara efisien dan presisi. Hal ini diwujudkan melalui pengintegrasian teknologi digital (*Smart Farming*), mekanisasi pertanian skala luas untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja, serta penggunaan benih unggul hasil yang adaptif. Dengan transformasi ini, sektor pertanian tidak hanya mendukung ekonomi hijau dan digital, tetapi juga mengubah wajah pertanian Indonesia menjadi sektor yang kompetitif dan memiliki daya tarik tinggi bagi generasi muda.

Dalam kerangka strategis tersebut, BRMP sebagai bagian integral dari Kementerian Pertanian memiliki peran vital untuk mendorong terwujudnya *enabling environment* yang memastikan kesiapan sektor pertanian bersaing di tengah tantangan global. BRMP melalui perakitan dan modernisasi pertanian menjadi perangkat strategis untuk meningkatkan daya saing nasional serta mengatasi berbagai tantangan inefisiensi demi mendorong optimalisasi hasil bagi pelaku bisnis, pembuat kebijakan, pelaku utama, maupun konsumen. Peran BRMP sangat strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan agroindustri, penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan daya saing produk di pasar global. Oleh karena itu, peningkatan komoditas dan daya saing produk melalui modernisasi pertanian tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis dengan mengurangi biaya produksi, tetapi juga memfasilitasi perdagangan yang adil, ekonomis, dan memiliki keberterimaan tinggi di pasar domestik maupun internasional. Modernisasi telah membuka dimensi baru yang berimplikasi positif pada proses inovasi, keamanan produk, manajemen risiko, hingga tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, BRMP berperan menyediakan fasilitas layanan yang memberikan jaminan konsistensi mutu, kompetensi, dan ketidakberpihakan. Kontribusi ini memperkuat *bargaining position* Indonesia di pasar internasional serta

memastikan pemanfaatan hasil modernisasi pertanian secara berkelanjutan untuk mendukung RPJMN 2025-2029.

Sebagai upaya mewujudkan visi Pertanian Maju Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian Pertanian membangun rumah strategi dengan delapan pilar. BRMP menjadi penopang utama pada Pilar ke-4, yaitu Pemanfaatan Teknologi Pertanian Modern. Pilar ini merupakan proses penerapan inovasi dan peralatan mutakhir dalam aktivitas pertanian, mulai dari pra-tanam, budidaya, panen, hingga pascapanen untuk meningkatkan efisiensi, mutu hasil, dan keberlanjutan usaha tani nasional secara menyeluruh.



Gambar 3. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029

3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan BRMP sebagai penopang utama Pilar ke-4 mencakup: (1) percepatan pertanian modern, presisi, dan berbasis data; (2) integrasi riset, inovasi dan perakitan teknologi pertanian; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian modern; dan (4) penerapan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berdasarkan arah kebijakan BRMP, maka arah kebijakan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta adalah percepatan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan serta modernisasi pertanian spesifik lokasi Jakarta dengan mengutamakan prisnsip berkelanjutan dan ramah lingkungan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian modern di perkotaan.

3.2 Strategi

Langkah strategis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dalam penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian dilakukan melalui:

a. Identifikasi dan inventarisasi teknologi dan modernisasi pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan daerah.
b. Pemetaan kebutuhan dan potensi penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.
c. Sosialisasi penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.
d. Penyusunan pedoman penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.
e. Pendampingan penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian kepada pelaku usaha dan pelaku utama bidang pertanian
f. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan pelaku utama bidang pertanian tentang penerapan paket teknologi spesifik lokasi dan modernisasi pertanian melalui pelatihan/ToT.
g. Diseminasi paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian berbasis kebutuhan pengguna dan penyediaan materi penyuluhan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.
h. Fasilitasi promosi dan pemasaran untuk yang sudah menerapkan modernisasi pertanian.
i. Kolaborasi dengan stakeholder terkait
j. Penyediaan informasi paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.
k. Monitoring dan evaluasi penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.
l. Peningkatan Kompetensi SDM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dan Kompetensi SDM pelaku pertanian perkotaan di Jakarta

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta mengampu 3 program yakni (1) Nilai tambah dan daya saing industri, (2) Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan (3) Dukungan Manajemen. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri diarahkan untuk mengakomodir aktivitas pendampingan lembaga, diseminasi dan penguatan sarana laboratorium, guna mendukung penerapan modernisasi pertanian dan penjaminan mutu. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas pemanfaatan teknologi dan instrumen pertanian terstandar, serta menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup, sehingga mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas menjamin produksi dan pasokan pangan. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi agar mampu secara ekonomi dan fisik untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan. Aktivitas ini meliputi produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi, perakitan/perekayasaan teknologi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perekayasaan serta modernisasi sistem pertanian nasional. Program ini berperan strategis dalam menyediakan dukungan administratif, teknis, dan kelembagaan guna memastikan bahwa proses pengembangan, penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi, serta modernisasi pertanian berjalan secara terarah, efisien, dan terintegrasi. Aktivitas dalam program ini mencakup fasilitasi penguatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi dan pemantauan kinerja teknologi, serta harmonisasi regulasi dan kebijakan lintas sektor. Selain itu, dukungan diberikan untuk memperkuat jejaring kolaborasi multipihak (*quatro helix*) antara pemerintah, lembaga riset, industri, dan komunitas pengguna teknologi. Dengan adanya dukungan manajemen yang efektif, proses modernisasi pertanian melalui penggunaan teknologi tepat guna, mekanisasi, digitalisasi, dan efisiensi rantai nilai dapat di akselerasi secara berkelanjutan, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian Indonesia khususnya di Daerah Khusus Jakarta.

Adapun Target Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta disusun dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)
b. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)
c. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)

d. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)
e. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (nilai)
f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)

Target kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2025-2029 telah ditetapkan, penetapan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan telah mempertimbangkan serta didasarkan pada capaian tahun sebelumnya. Target kinerja 2025-2029 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dilampirkan pada tabel berikut. Sedangkan Rincian Target pencapaian Indikator Kinerja Utama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2025-2029 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

Tabel 2. Target Kinerja 2025-2029 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		UTAMA						
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	Lembaga	1	1	1	2	2
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Teknologi	0	1	1	1	1
		Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)	Unit	0	8	8	8	8
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern (Orang)	Orang	0	125	250	375	500
		LAINNYA						
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Moderenisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	Nilai (0-100)	85.56	87,68	87,68	87,68	87,68
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	Nilai (0-100)	95.02	95.02	95.02	95.02	95.02

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaca mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta pelaksanaan arah dan kebijakan tidak terlepas dari dukungan pendanaan. Program dan kegiatan penerapan modernisasi pertanian perlu didukung dengan kerangka pendanaan yang kuat dan memadai,

baik yang bersumber dari APBN murni dan PNBP, Sumber-sumber pendanaan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata dalam usaha peningktan penerapan modernisasi pertanian dalam rangka peningkatan produksi, kualitas, nilai tambah dan daya saing industri. Rencana alokasi anggaran lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta mengacu pada konsep *money follow program,* terutama program dan kegiatan prioritas BRMP yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029, Renstra BRMP 2025-2029 dan Renstra BBPRMP 2025-2029.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendanaan, ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan antara lain mendorong penerimaan PNBP pada satuan kerja, menjajaki kerjasama dengan *stakeholder* seperti Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.

V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan implementasi Renstra Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) dan Balai Besar Penerapan dan Pengembangan Modernisasi Pertanian. Renstra ini juga dimaksudkan sebagai Rencana Aksi kegiatan penerapan modernisasi pertanian spesifik lokasi yang menjabarkan dinamika lingkungan strategis dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan penerapan modernisasi pertanian. Renstra ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target pencapaian sasaran sehingga akuntabilitas kegiatan pengkajian dapat dievaluasi dengan baik. Renstra ini dapat ditelaah setiap tahunnya sehinga memungkinkan untuk terjadi perubahan atau penyesuaian, disesuaikan dengan kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian. Pada akhirnya, dokumen ini ditujukan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan penerapan modernisasi pertanian spesifik lokasi di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.

Lampiran 1. Manual Indikator Kinerja Utama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

Sasaran dan Indikator Kinerja: BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Teknologi
		3. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit)	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	4. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern (Jumlah)	Orang
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)	Nilai

1. **Manual Indikator 1: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)**

Program	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	**Definisi** Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
	Formula Menghitung jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
	Tujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian
Satuan	Lembaga
Target	2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 2 2029: 2
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact

<table>
<tr><td>Jenis cascading IKU</td><td>☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta
☐ Non Cascading</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading</td><td>☐ Adopsi Langsung
☐ Dipersempit
☐ Komponen Pembentuk
☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize</td></tr>
<tr><td>Unit/ Pihak Penyedia Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data</td><td>☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan</td></tr>
<tr><td>Mitigasi Risiko</td><td>
<table>
<tr><th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr>
<tr><td>Rendahnya pemahaman lembaga penerap terkait standar</td><td>Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.</td></tr>
<tr><td>Komitmen Lembaga Penerap untuk menerapkan standar secara konsisten masih rendah</td><td>Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Catatan</td><td></td></tr>
</table>

2. **Manual Indikator 2: Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)**

Program	**Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	**Definisi** Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasikan pada tahun berjalan
	Tujuan Mengukur kinerja dan capaian teknologi pertanian adaptif sebagai dasar perumusan kebijakan, mengukur daya saing, maupun kesenjangan digital/modernisasi
Satuan	Teknologi
Target	2025: 0 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

<table>
<tr><td></td><td>☐ Dipersempit
☐ Komponen Pembentuk
☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize</td></tr>
<tr><td>Unit/ Pihak Penyedia Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data</td><td>☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan</td></tr>
<tr><td>Mitigasi Risiko</td><td>
<table>
<tr><th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr>
<tr><td>Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.</td><td>Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.</td></tr>
<tr><td>Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani</td><td>Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.</td></tr>
<tr><td>Minimnya dukungan sarana dan prasarana, kelembagaan dan pendampingan</td><td>Optimalisasi peran penyuluh, kolaborasi dengan CSR, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Catatan</td><td></td></tr>
</table>

3. **Manual Indikator 2: Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan**

Program	**Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Indikator Kinerja Kegiatan	**Produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan** (Unit)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	**Definisi** Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.
	Formula Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasikan pada tahun berjalan
	Tujuan untuk menyediakan benih/bibit spesifik lokasi yang unggul dan bermutu, adaptif terhadap kondisi agroekosistem setempat, dan terjamin ketersediaannya, sehingga mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, serta keberlanjutan.
Satuan	Unit
Target	2025: 0 2026: 8 2027: 8 2028: 8 2029: 8
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High

<table>
<tr><td>Tingkat Validitas</td><td>☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact</td></tr>
<tr><td>Jenis cascading IKU</td><td>☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta
☐ Non Cascading</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading</td><td>☐ Adopsi Langsung
☐ Dipersempit
☐ Komponen Pembentuk
☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize</td></tr>
<tr><td>Unit/ Pihak Penyedia Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data</td><td>☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan</td></tr>
<tr><td>Mitigasi Risiko</td><td>
<table>
<tr><th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr>
<tr><td>Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat</td><td>Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya</td></tr>
<tr><td>Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.</td><td>Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.</td></tr>
<tr><td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td><td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td></tr>
<tr><td>Kerusakan benih saat proses pascapanen (pengeringan tidak optimal/hujan/lahan untuk penjemuran terbatas/alat pengering minim)</td><td>Pengaturan musim tanam, Optimasilasi rak pengeringan</td></tr>
<tr><td>Kerusakan benih saat penyimpanan</td><td>Pengendalian hama gudang penyimpanan, Pengendalian sanitasi, suhu dan kelembaban gudang</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Catatan</td><td></td></tr>
</table>

4. **Manual Indikator 4: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)**

Program	**Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
Indikator Kinerja Kegiatan	**Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)**
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	**Definisi** Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
	Tujuan Untuk melihat gambaran tingkat penerapan modernisasi pertanian di tingkat pelaku utama, sebagai dasar evaluasi efektivitas diseminasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta percepatan transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan
Satuan	Jumlah
Target	2025: 0 2026: 125 2027: 250 2028: 375 2029: 500
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

<table>
<tr><td></td><td>☐ Dipersempit
☐ Komponen Pembentuk
☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize</td></tr>
<tr><td>Unit/ Pihak Penyedia Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data</td><td>☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan</td></tr>
<tr><td>Mitigasi Risiko</td><td>
<table>
<tr><th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr>
<tr><td>Tingkat penerapan teknologi digital, smart farming, dan modern oleh pengguna rendah</td><td>Pendampingan dan bimbingan teknis untuk target pengguna modernisasi pertanian, pendampingan teknis dan sosialisasi kepada pengguna</td></tr>
<tr><td>Keterbatasan sarana prasarana pendukung penerapan modernisasi pertanian</td><td>Optimalisasi kolaborasi dan sinergi antar isntansi, Penjaringan CSR</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Catatan</td><td></td></tr>
</table>

5. **Manual Indikator 5: Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta**

Program	**Dukungan Manajemen**
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien melalui tata kelola yang akuntabel, proses kerja terstandar dan berbasis digital, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada layanan prima.
Indikator Kinerja Kegiatan	**Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)**
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	**Definisi** Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
	Formula 1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal 2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai PMPRB BRMP
	Tujuan Mewujudkan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Satuan	Nilai
Target	2025: 85.56 2026: 87.68 2027: 87.68 2028: 87.68 2029: 87.68
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

<table>
<tr><td>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</td><td>Tidak ada</td></tr>
<tr><td>Dukungan Indikator Kinerja Program</td><td>Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)</td></tr>
<tr><td>Jenis Aspek Target</td><td>☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu
☐ Waktu ☐ Biaya</td></tr>
<tr><td>Tingkat Kendali</td><td>☒ Low ☐ Moderate ☐ High</td></tr>
<tr><td>Tingkat Validitas</td><td>☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact</td></tr>
<tr><td>Jenis cascading IKU</td><td>☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta
☐ Non Cascading</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading</td><td>☐ Adopsi Langsung
☐ Dipersempit
☐ Komponen Pembentuk
☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize</td></tr>
<tr><td>Unit/ Pihak Penyedia Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data</td><td>☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan</td></tr>
<tr><td>Mitigasi Risiko</td><td>
<table>
<tr><th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr>
<tr><td>Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja</td><td>Komitmen Pimpinan dalam internalisasi nilai-nilai pembangunan ZI sehingga menjadi budaya kerja, Sosialisasi 6 nilai pembangunan ZI secara berkala</td></tr>
<tr><td>Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.</td><td>updating eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk pengumpulan eviden.</td></tr>
<tr><td>SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas</td><td>Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Catatan</td><td></td></tr>
</table>

6. **Manual Indikator 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)**

Program	**Dukungan Manajemen**
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, patuh regulasi, serta efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja..
Indikator Kinerja Kegiatan	**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta (Nilai)**
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	**Definisi** Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA..
	Formula Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu
	Tujuan Mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, patuh regulasi, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja..
Satuan	Nilai
Target	2025: 95.02 2026: 95.02 2027: 95.02 2028: 95.02 2029: 95.02
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

<table>
<tr><td>Jenis Aspek Target</td><td>☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu
☐ Waktu ☐ Biaya</td></tr>
<tr><td>Tingkat Kendali</td><td>☒ Low ☐ Moderate ☐ High</td></tr>
<tr><td>Tingkat Validitas</td><td>☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact</td></tr>
<tr><td>Jenis cascading IKU</td><td>☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta
☐ Non Cascading</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading</td><td>☐ Adopsi Langsung
☐ Dipersempit
☐ Komponen Pembentuk
☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize</td></tr>
<tr><td>Unit/ Pihak Penyedia Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BRMP Penerapan</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data</td><td>☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan</td></tr>
<tr><td>Mitigasi Risiko</td><td>
<table>
<tr><th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr>
<tr><td>Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat</td><td>Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.</td></tr>
<tr><td>Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.</td><td>Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.</td></tr>
<tr><td>Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan</td><td>Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan</td></tr>
<tr><td>Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal</td><td>Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Catatan</td><td></td></tr>
</table>